



Pendidikan perdamaian: sebuah urgensi di tengah maraknya konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antar-golongan di Indonesia

Ganes Harpendya ^{a,1*}, Siswo Hadi Sumantri ^{b,2}, Bambang Wahyudi ^{c,3}

^a Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

¹ gharpendya@gmail.com; ² siswohs1@gmail.com; ³ buangwagyu2761@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

16-03-2022

Disetujui:

4-04-2022

Kata kunci:

Konflik Sosial
Masyarakat
Pendidikan
Perdamaian
SARA

Received:

16-03-2022

Accepted:

4-04-2022

Keywords:

Social Conflicts
Society
Education
Peace
SARA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menguraikan dinamika konflik sosial di Indonesia dan menganalisis urgensi pelaksanaan pendidikan perdamaian sebagai salah satu upaya pencegahan konflik di masyarakat. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan fokus utama pada konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, dan sumber lain yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial di Indonesia mengalami eskalasi tinggi, terutama pasca pemerintahan Orde Baru atau pada masa transisi, yang ditandai dengan banyaknya korban jiwa dan kerugian materi. Eskalasi konflik menurun pasca tahun 2003, setelah adanya kesepakatan dan resolusi konflik di berbagai daerah. Konflik sosial kembali menjadi tren semenjak tahun 2014-2019. Kali ini penyebab utamanya adalah adanya isu politik-agama, kemudian terakselerasi pada tahun-tahun politik. Selain itu, hasil lain menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian memiliki peran penting dalam mencegah potensi konflik sosial, yang dapat dioptimalkan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

ABSTRACT

Peace Education: an urgency amid the rise of social conflicts with ethnic, religious, racial, and intergroup dimensions in Indonesia. This article aims to outline the dynamics of social conflict in Indonesia and analyze the urgency of the implementation of peace education as one of the efforts to prevent conflict in the society. This article was compiled using library research methods, with a primary focus on ethnic, religious, racial, and interracial social conflicts (SARA). Researchers collect data from various sources, such as journal articles, books, and other related sources. The results of this study show that social conflicts in Indonesia are experiencing a high escalation, especially after the New Order government or during the transition period, which is characterized by many casualties and material losses. The escalation of the conflict decreased after 2003, after the agreement and resolution of conflicts in various regions. Social conflict has been a trend again since 2014-2019. This time, the main cause is the existence of political-religious issues that accelerated during political years. In addition, other results show that peace education has an important role in preventing potential social conflicts, which can be optimized on formal, nonformal, and informal pathways.

Copyright © 2022 (Authors). All Right Reserved

How to Cite: Harpendya, G., Sumantri, S. H., & Wahyudi, B. (2022). Pendidikan perdamaian: sebuah urgensi di tengah maraknya konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antar-golongan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 77-86. DOI: <http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26488>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal holds the copyright.

Pendahuluan

Konflik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks di Indonesia konflik

sosial seringkali dipicu oleh kemajemukan struktur masyarakatnya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan

masyarakat yang sangat majemuk atau multikultur, meliputi suku, agama, ras, dan antargolongan atau dikenal dengan istilah SARA. Dari adanya kemajemukan tersebut potensi konflik dengan dimensi yang sama akan semakin tinggi. Meskipun terdapat faktor-faktor lain sebagai penyebab dari konflik tersebut seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan politik. Secara umum, potensi konflik pada masyarakat Indonesia yang majemuk secara demografis maupun sosiologis terbesar disebabkan oleh perbedaan dan pembelahan masyarakat ke dalam suatu pengelompokan berdasarkan identitas kultural (Zuldin, 2019)

Dari banyak data yang ditemukan bahwa konflik SARA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi di penghujung Orde Baru sampai saat ini, konflik SARA semakin meningkat jumlahnya. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain, konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit, konflik Ambon, konflik rasial masyarakat Papua, dan konflik yang dipicu dugaan penistaan agama yang juga masih kerap kali terjadi sampai saat ini. Beberapa isu SARA juga diperkuat dengan adanya kepentingan politik yang berusaha memanfaatkannya, baik untuk menunjukkan identitas suatu kelompok maupun menjatuhkan kelompok lain. Hal ini berimplikasi terhadap polarisasi dan pembelahan di masyarakat (Siregar, 2017).

Dari fenomena di atas dapat dianalisis bahwa dinamika konflik SARA yang mengalami peningkatan di Indonesia, memberikan gambaran dan kecenderungan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang pluralitas atau kemajemukan budaya masih memiliki keterbatasan. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahayu, Jayusman dan Sodik (2016) berjudul *Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995* memperjelas bahwa isu SARA tidak pernah dipahami secara kontekstual sebagai sebuah kenyataan yang harus dikaji secara objektif, akan tetapi SARA lebih dipandang sebagai suatu permasalahan yang tidak pernah terjadi secara nyata (Rahayu et al., 2016). Sederhananya, permasalahan SARA semestinya perlu dipahami sebagai ranah yang dapat memicu ketegangan maupun konflik sosial di masyarakat, baik dalam bentuk konflik laten maupun konflik yang bermanifestasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan dan pencegahan agar konflik berdimensi SARA tidak semakin membesar.

Salah satu yang dapat dijadikan alternatif pengelolaan kemajemukan dalam rangka meningkatkan pemahaman isu SARA yaitu melalui pendidikan perdamaian (Nurcholish, 2021). Pendidikan perdamaian merupakan cara jangka panjang yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya konflik-konflik sosial berdimensi SARA. Pendidikan perdamaian dapat dilakukan secara formal melalui jenjang pendidikan di sekolah maupun secara informal di kehidupan sehari-hari melalui keluarga, dan sosial kemasyarakatan. Di banyak penelitian pendidikan perdamaian lebih sering mengkaji hanya pada lingkungan pendidikan formal di sekolah. Salah satunya penelitian Noorfitriyani dkk (2018) tentang *Pencegahan Perilaku Agresif: Pengaruh Pendidikan Perdamaian dan Literasi Media Terhadap Pemahaman Siswa tentang Agresivitas*. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa pendidikan perdamaian dan tingkat literasi yang semakin baik akan menurunkan agresivitas siswa dalam pengambilan keputusan agresif (Noorfitriyani et al., 2018). Artinya dukungan adanya pendidikan perdamaian dan literasi yang baik sebetulnya juga dibutuhkan di lingkungan luar sekolah. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya pandemi Covid-19 di dua tahun terakhir ini, sehingga membuat interaksi di sekolah sangat jarang dan kurang efektif.

Sementara itu, pendidikan perdamaian di sekolah sebagian besar yang didapatkan berupa pengetahuan kognitif dari berbagai mata pelajaran. Pemahaman ini dapat menjadi bekal generasi muda dalam memahami konteks kemajemukan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Di sisi lain, pendidikan perdamaian secara sosial menjadi tantangan tersendiri, karena dalam ranah ini pendidikan perdamaian dituntut untuk mampu memberikan suatu kesadaran multikultural masyarakat. Dimana dalam kesadaran multikulturalisme terdapat pengakuan terhadap pluralisme budaya yang ada, yang mana berguna dalam menumbuhkan kepedulian, bahwa keberadaan mayoritas dan minoritas suatu kebudayaan harus diintegrasikan dan diakomodasi, sehingga kekhasan identitas masing-masing kelompok diakui secara objektif dan rasional (Lue & Riyanto, 2020).

Di satu sisi, perdamaian merupakan bagian dari kajian multikulturalisme, yang melihat perbedaan budaya atau pluralitas masyarakat sebagai sebuah realitas yang ada, sehingga menciptakan sebuah kesadaran dan sikap toleransi. Akan tetapi, di sisi lain perlu diketahui perbedaan antara pendidikan perdamaian dan

pendidikan multikulturalisme, seperti yang dikatakan Fountain (1999) bahwa pendidikan perdamaian selain menekankan pada aspek pengetahuan dan sikap, juga berusaha memberdayakan kecakapan atau keterampilan seseorang, sehingga diharapkan mampu mencegah konflik kekerasan yang bersifat terbuka maupun terstruktur, menyelesaikan konflik secara nirkekerasan, dan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk perdamaian dalam tingkat individu, antarindividu, antarkelompok, nasional, sampai internasional (Wibowo, 2021). Sederhananya pendidikan perdamaian adalah suatu proses pendidikan yang didasarkan pada filosofi yang mengajarkan nir kekerasan, cinta, kasih sayang, kepercayaan (*trust*), keadilan, kerjasama seluruh umat manusia sebagai sebuah kecakapan hidup bersama (Sukendar, 2011).

Dari kecakapan yang diharapkan tersebut pendidikan perdamaian yang dilakukan secara terus-menerus dikatakan Elise Boulding akan menghasilkan dan membentuk budaya damai di masyarakat (Sukendar, 2011). Tentunya hal ini tidak dapat dilepaskan dari konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tempat dan sarana seseorang menerima berbagai pemahaman dan pengalaman. Oleh karenanya, dalam pendidikan perdamaian sudah semestinya dilakukan dari berbagai pendekatan, tidak hanya melalui pendekatan kultur atau budaya, tetapi juga psikologis, sosiologis, historis dan berbagai pendekatan lain. Mengingat kondisi damai tidak terlepas dari berbagai bentuk dan dinamika konflik dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.

Dalam praktik pembelajaran formal pendidikan perdamaian telah terakomodasi dan terintegrasi dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Pendidikan Agama. Beberapa materi tentang keberagaman, multikulturalisme, toleransi, dan keadilan telah termuat secara eksplisit dan diajarkan kepada peserta didik. Adapun pembelajaran nonformal terdapat pada bentuk-bentuk kegiatan yang diikuti di luar pendidikan formal, seperti pengajian, kursus atau bimbingan belajar dsb. Nilai-nilai damai yang diperoleh sebagian besar secara tidak langsung atau implisit.

Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mencoba melihat bagaimana dinamika konflik sosial yang ada di Indonesia dan urgensi penguatan pendidikan perdamaian di tengah maraknya konflik sosial berdimensi suku, agama, ras, dan antargolongan

(SARA) di Indonesia sebagai upaya pencegahan konflik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Data-data yang dikumpulkan dan diolah bersumber dari buku-buku, artikel jurnal, maupun sumber-sumber lain yang kredibel dan memiliki kaitan dengan penelitian ini. Setelah dikumpulkan kemudian data diolah, dianalisis, dan divalidasi menggunakan teori-teori yang relevan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, dengan mengaitkan permasalahan yang menjadi pembahasan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang dianalisis dianggap dapat menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Sosial

Terjadinya konflik sosial yang muncul ke permukaan seolah merupakan sebuah fenomena yang dianalogikan seperti 'gunung es'. Kondisi yang tampak di permukaan tidak dapat begitu saja merepresntasikan keseluruhan fenomena konflik. Bahkan sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari bongkahan es yang ada di bawah permukaan air yang tidak tampak, akan tetapi jauh lebih besar. Kompleksitas konflik sosial juga demikian, berbagai penyebab, faktor, dan akar permasalahan konflik yang ada pada masyarakat bisa saja tidak disadari maupun terlihat secara nyata, sehingga menjadi konflik laten.

Hal ini merupakan realitas yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia, karena pada dasarnya menurut Soerjono Soekanto (1983) dalam *Pribadi dan Masyarakat* segala peristiwa yang terjadi sehari-hari selalu melibatkan manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai kelompok masyarakat. Di satu sisi, secara alamiah manusia memiliki sifat impulsif dan irasional, yang didasarkan pada perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya. Dari berbagai perasaan ini kemudian mendorong manusia membentuk kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang menjadi bagian dari suatu masyarakat, yang sekaligus menjadi motivasi terbentuknya berbagai hasil yang bersifat intelektual (Soekanto, 1983).

Proses terbentuknya kelompok dan golongan pada akhirnya akan berimplikasi pada munculnya identitas sosial masyarakat. Identitas sosial seperti yang dikemukakan Tajfel (1978)

merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaan dirinya dalam suatu kelompok sosial bersama dengan nilai atau signifikansi emosional yang melekat pada keanggotaan kelompok tersebut. Kecenderungan ketika berada dalam sebuah kelompok, seseorang akan merasa bahwa dirinya tidak hanya bagian dari kelompok tersebut. Akan tetapi kelompok juga merupakan bagian dari dirinya. Sebagian keanggotaan kelompok akan mendefinisikan identitas seseorang yang menjadi bagiannya. Anggota kelompok diberikan pemahaman 'siapa kita' dan 'siapa mereka' atau yang membedakan kelompoknya dengan kelompok lain. Kemudian, Tajfel mengatakan bahwa keberadaan seseorang dalam sebuah kelompok dengan adanya ikatan kelompok, maka akan membawa seseorang dan menentukan perasaannya. Seseorang akan memiliki perasaan yang nyaman, lembut, dan hangat dalam berpikir jika berkaitan dengan kelompoknya. Sekaligus juga dapat seketika terpancing kemarahan jika terdapat hal yang menyinggung atau menyakiti kelompoknya, ataupun perasaan bersalah ketika anggota kelompoknya menyinggung atau menyakiti kelompok lain (Hogg, 2016).

Teori identitas sosial secara garis besar terdiri dari dua bagian. Yang *pertama*, lebih mendasar pada bagian psikologis, dimana menjelaskan proses kognitif yang mendasari definisi identitas sosial, dan asumsi motivasi bahwa orang berjuang untuk identitas sosial yang positif. *Kedua*, bagian sosio-struktural menggambarkan bagaimana orang mengatasi identitas sosial yang negatif (Scheepers & Ellemers, 2019).

Dari penjelasan teori identitas sosial Tajfel, dapat dikatakan bahwa konflik sosial akan cenderung menguat apabila perasaan atau emosi lebih diutamakan, ketimbang menempatkan masalah secara proporsional dan objektif, dalam mempertimbangkan dan membela kepentingan atau apa yang dianggap benar dari masing-masing kelompok yang bertikai. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, hal ini juga dapat ditengarai karena keinginan manusia yang untuk mendapat pengakuan atau penghargaan. Kuatnya keterikatan identitas yang mengkategorikan seseorang pada kelompok tertentu, akan sangat sulit dalam membangun kerja sama yang harmonis, masalah perasaan etnosentris dan adanya prasangka masih menjadi anggapan adanya kesenjangan budaya antarkelompok. Upaya penyatuan akan terus dimaknai sebagai

suatu hal yang mengancam identitas, dan akan terus mendapat penolakan (Hogg, 2016)

Dalam tinjauan sosiologi, teori konflik mengkaji dinamika perubahan sosial yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Proses perubahan sosial ini ditandai dengan adanya pertentangan yang terus-menerus terjadi antara unsur-unsur masyarakat, sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berbeda pada keadaan semula. Teori ini muncul sebagai antitesis dari teori struktur fungsional yang menganggap masyarakat hidup dalam keteraturan, dan mengabaikan adanya konflik dan perubahan sosial. Oleh karena itu, konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Realitas manusia sebagai makhluk sosial dimanapun dan kapanpun akan muncul benturan, dari berbagai sikap, pendapat, perilaku, dan kepentingan, serta kebutuhan-kebutuhan yang akan selalu bertentangan, sehingga dinamika dari proses tersebut yang akan mengarahkan pada suatu perubahan-perubahan (Rosana, 2015).

Persaingan yang tidak sehat merupakan pintu masuk terjadinya konflik sosial. Eskalasi konflik dapat semakin tinggi dan berujung kekerasan, atau dapat juga menjadi sebuah perdamaian. Hal ini tergantung pada pengelolaan konflik oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Konflik tidak mengalami eskalasi dan masih menjadi potensi jika ketegangan masih dapat diredam. Akan tetapi konflik akan berubah menjadi kekerasan dan kerusuhan massa apabila para aktor melakukan sebuah gerakan sosial (Rosyid, 2020). Oleh karena, itu dibutuhkan kecerdasan dalam memahami dan menyikapi perubahan sosial yang di dalamnya pasti terdapat benturan-benturan antarindividu maupun kelompok.

Dinamika Konflik Sosial Berdimensi SARA di Indonesia

Pasca Orde Baru studi tentang konflik di Indonesia mulai banyak menjadi bahan kajian yang diungkap dan dipublikasikan. Pada awal berakhirnya Orde Baru dan beberapa tahun setelahnya (1998-2003) atau lebih dikenal sebagai masa reformasi, yang bertransisi menuju konsolidasi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi pada masa ini juga masyarakat Indonesia terjebak dalam dinamika konflik sosial yang banyak berujung pada kekerasan (*riot*). Konflik ini terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, dan menimbulkan korban jiwa dengan jumlah yang cukup tinggi. Fenomena konflik yang terjadi pada masa ini dikenal juga dengan

istilah kerusuhan sosial yang di dalamnya banyak terlibat berbagai elemen masyarakat, suku, ras, dan agama, dan antargolongan (Muliono, 2020).

Konflik sosial di Indonesia setidaknya memiliki tiga periode pembagian waktu yang menjadi catatan penting dalam mengkaji dinamika konflik berwujud kekerasan, yaitu periode rezim Orde Baru, periode masa transisi awal (1997-2003), dan periode pasca reformasi (tahun 2004 hingga sekarang). Tiga periode ini memiliki pola konflik kekerasan yang berbeda dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Di masa Orde Baru (1965-1997), karena militer sangat memegang kendali, sehingga konflik-konflik sosial yang terjadi lebih banyak diselesaikan dengan pendekatan militer. Kemudian, pada periode kedua atau masa transisi (1997-2003), seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa eskalasi konflik cenderung tinggi dan banyak memakan korban jiwa, seperti konflik Sampit antara masyarakat suku Dayak dan Madura di tahun 2001 (Barron et al., 2016).

Muliono (2020) menegaskan bahwa pada periode 1998-2003 memang merupakan periode besar perubahan sosial di dunia, di mana salah satunya adalah Indonesia yang mengalami perubahan suasana politik, sosial, dan ekonomi pada tingkat nasional, yang sekaligus secara bersamaan terjadi transisi sistem pemerintahan yang otoriter kepada sistem yang lebih demokratis, dari sistem pemerintahan sentralistik kepada desentralistik, dan perubahan struktur perekonomian pasca krisis moneter di Asia. Dalam situasi ini Indonesia mengalami kegagalan dalam menghadapi perubahan iklim sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menyebabkan terjadinya konflik di antara kelompok masyarakat yang berdimensi suku, agama, ras, antargolongan, serta konflik antara aparat negara dengan masyarakat sipil. Akibat stabilitas politik dan kondisi keamanan yang lemah pada sebagian besar sengketa masyarakat di tingkat lokal juga memicu kemungkinan terjadinya eskalasi kekerasan (Muliono, 2020).

Pada akhirnya, Indonesia mengalami berbagai konflik dan kekerasan dengan eskalasi tinggi yang kurang lebih sekitar setengah dekade di banyak wilayah.

Tabel 1 Ringkasan konflik masa transisi di Indonesia

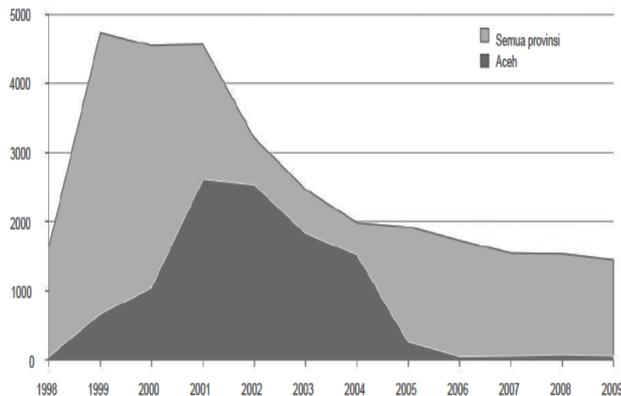
Provinsi	Bentuk	Periode	Meninggal	Cidera	Bangunan
Aceh	Perang Sipil	Jan '98 - akhir Jul '05	10.613	8.546	9.230
Maluku Utara	Komunal	Agu '99 - akhir Jun '00	3.257	2.635	15.004
Maluku	Komunal	Jan '99 - akhir Feb '02	2.793	5.057	13.843
Timor-timur	Perang Sipil	Jan '98 - akhir Des '99	1.485-1.585	-	-
Kalimantan Barat	Komunal	Jan '97 - akhir Feb '97/Febr '99 - akhir Apr '99	1.103	646	3.830
Kalimantan Tengah	Komunal	Feb '01 - akhir Apr '01	1.031	77	1.998
Sulawesi Tengah	Komunal	Apr '00 - akhir Des '01	517	579	6.004
Total			20.799 -21.799	17.540 +	49.909 +

Sumber: Barron, Jaffrey, & Ashutosh (2016)

Konflik dan kekerasan yang terjadi telah membuat banyak sekali kerugian di banyak wilayah, baik kerugian korban jiwa dan kerusakan-kerusakan bangunan. Menurut Barron, Jaffrey, & Ashutosh (2016) Di dua provinsi, perang saudara yang berlangsung lama mendapatkan momentum baru. Di Aceh, perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan militer Indonesia memanas dengan sedikitnya 8.775 meninggal antara tahun 1999 dan 2003, sementara 1.521 lainnya kehilangan nyawa mereka pada tahun 2004. Perang di Timor Timur, mengakibatkan 1.400 - 2.600 orang meninggal. Papua juga mengalami kekerasan separatis, meskipun ini jauh lebih sporadis daripada di Aceh atau Timor (Barron et al., 2016).

Setelah tahun 2003, konflik kekerasan bereskalasi tinggi di beberapa daerah dapat dicapai jalan resolusi, seperti konflik di Aceh, Ambon, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga tingkat kekerasan yang menyebabkan korban jiwa mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2008 (Muliono, 2020). Provinsi-provinsi yang sebelumnya terjebak dalam kekerasan yang sangat merusak dan merugikan, telah berpindah ke fase dimana sebagian besar tidak adanya kekerasan dengan eskalasi besar. Akan tetapi kekerasan bereskalasi kecil terus dan masih sering terjadi, yang mana seringkali mengambil bentuk baru. Lebih jauh lagi, daerah-daerah yang sebelumnya terkena dampak

kekerasan tingkat tinggi terus menyimpan kerentanan tertentu .



Gambar 1. Penurunan kematian terkait konflik dan kekerasan di Indonesia
 Sumber: Barron, Jaffrey, & Ashutosh (2016)

Berdasarkan gambar eskalasi konflik di atas, terlihat bahwa masa transisi konflik dan kekerasan berskala tinggi mengalami penurunan pada akhir tahun 2003 yang merupakan fase yang membedakan fase konflik tinggi dari fase konflik rendah. Hal ini tidak terlepas karena banyaknya kesepakatan damai dan resolusi konflik di tahun tersebut. Akan tetapi, yang menjadi sebuah pengecualian adalah perang saudara di Aceh, yang baru berakhir pada Agustus 2005.

Meskipun konflik sosial yang terjadi terdapat perbedaan yang jelas antara masa orde baru, masa transisi, dan masa deeskalasi tahun 2004 hingga sekarang, konflik sosial di Indonesia cenderung menemui babak baru, terutama sejak 2014-2019 yang ditandai dengan tahun-tahun politik. Isu agama pada masa ini dimanfaatkan dan memiliki posisi sentral dalam menciptakan polarisasi dan konflik sosial di masyarakat. Perbedaan pandangan, tidak lagi dimaknai sebagai sebuah hal yang dapat dikompromikan jika memang bisa, dan harus ditoleransi jika memang tidak memungkinkan. Akan tetapi, lebih banyak perilaku memaksakan, mau menang sendiri, yang berujung pada intoleransi, baik dari sesama pemeluk agama, maupun dengan agama lain.

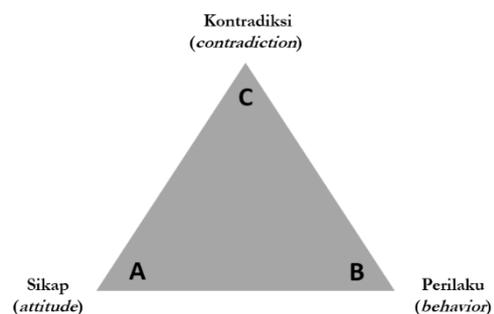
Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa selama kurun enam tahun terakhir tepatnya 2015 hingga 2020, angka KUB nasional sempat mengalami peningkatan yaitu tahun 2015 (75,36) dan tahun 2016 (75,47). Akan tetapi cenderung turun di empat tahun terakhir semenjak tahun 2017

(72,27), dan tahun 2018 (70,90). Sempat naik di tahun 2019 (73,83), akan tetapi turun cukup besar di tahun 2020 (67,46) (Burhani et al., 2020). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kerukunan umat beragama mengalami penurunan yang cukup drastis terutama semenjak tahun 2017 hingga 2020.

Isu politik-agama yang pada awalnya banyak berangkat dari Jakarta harus menjadi sebuah perhatian serius, karena berdasarkan survei SETARA Institute (2018), kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, dan Makassar masuk ke dalam kategori kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Berikut merupakan data 10 kota dengan Indeks Kota Toleran terendah: Tanjung Balai (2,817), Banda Aceh (2,830), Jakarta (2,880), Cilegon (3,420), Padang (3,450), Depok (3,490), Bogor (3,533), Makassar (3,637), Medan (3,710), dan Sabang (3,757) (Burhani et al., 2020).

Hal ini membuktikan agama masih sangat rentan untuk dimanfaatkan ataupun dipolitisasi untuk berbagai kepentingan. Di satu sisi adanya pemanfaatan agama sebagai sebuah isu yang mudah menarik perhatian simpati dan dukungan, serta gesekan, setidaknya telah menimbulkan dampak serius dan melahirkan rentetan konflik sosial di masyarakat. Pemanfaatan agama ini diwujudkan dengan pelibatan simbol-simbol, aktor, dan berbagai *statement* yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Hal ini berujung pada tindakan-tindakan yang diklaim sebagai sebuah perintah agama (Effendi & Syafrudin, 2020).

Menurut Galtung, konflik sosial dapat digambarkan dengan segitiga konflik (segitiga ABC) dengan komponen, sikap (*Attitude/A*), perilaku (*behavior/B*) kontradiksi (*contradiction/C*) (Galtung, 1996). Berikut jika digambarkan,



Gambar 2. Segitiga konflik Johan Galtung
 Sumber: Galtung (1996)

Jika dianalisis lebih dalam pada bagian kontradiksi, agama muncul sebagai dualisme keyakinan pemahaman, satu pihak menganjurkan adanya penyatuan agama dan politik, dengan

keyakinan bahwa ajaran agama bersifat menyeluruh di segala bidang kehidupan. Di pihak lain agama dianggap sebagai sisi yang berbeda dengan politik, bahkan ada anggapan agama harus terbebas dari adanya pernak-pernik politik. Adanya polarisasi dan kontradiksi agama dan politik ini, pada akhirnya akan memunculkan masyarakat untuk memiliki sikap yang berbeda yang cenderung dipertahankan. Sikap ini merupakan persepsi, atau stereotipe terhadap kelompok lain. Terjadinya konflik dan kekerasan biasanya didukung dengan stereotip negatif kepada pihak lain. Dari sikap akan mendorong kepada suatu perilaku yang dianggapnya benar. Pada situasi konflik perilaku ditunjukkan dengan tindakan-tindakan permusuhan, dengan ciri seperti mengancam, memaksa, menyerang, bahkan merusak.

Hal ini dibuktikan pada tingkat masyarakat awam atau masyarakat yang rentan terbawa polemik, ruang perbincangan terkait isu agama ini begitu ramai, bahkan hampir selalu muncul dalam tiap obrolan setiap harinya, baik dalam suasana pertemuan langsung, maupun dalam ruang obrolan di grup-grup *WhatsApp* maupun grup-grup chat lainnya. Sementara itu, pada tataran elite politik, isu ini juga mendorong berbagai manuver para aktor politik, baik yang bertujuan negatif, yaitu memolitisir isu dan berusaha menggunakannya sebagai alat untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya, maupun yang memiliki tujuan positif, dengan meredam eksploitasi kasus penistaan agama maupun demonstrasi (Effendi & Syafrudin, 2020).

Meskipun konflik yang terjadi pada periode ini belum sampai menimbulkan konflik berskala tinggi yang merenggut korban jiwa, seperti apa yang terjadi di periode transisi Orde Baru, konflik ini merupakan konflik SARA yang menjadi bahaya laten. Bukan tidak mungkin potensi konflik yang lebih besar dapat terjadi di tahun-tahun mendatang. Tidak hanya berasal dari agama, tapi juga yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan cara jangka panjang dalam membendung dan mencegah terjadinya potensi konflik sosial ini.

Penguatan Pendidikan Perdamaian sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial

Maraknya konflik sosial yang sebelumnya telah dibahas memberikan kerangka pemikiran bahwa diperlukan pengelolaan konflik, yang meliputi pencegahan, dan penanganan konflik.

Dalam konteks konflik-konflik yang sedang atau telah terjadi di masyarakat, penanganan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik maupun transformasi konflik, menuju perdamaian dan keadaan damai. Sementara itu, pada tataran konflik yang masih menjadi potensi dan dianggap merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, sehingga sewaktu-waktu akan dapat terjadi, maka pencegahan konflik merupakan langkah yang harus ditempuh. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan perdamaian. Salah satu esensi dari tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945. Sementara, perdamaian dunia sebagai suatu cita-cita negara yang juga tertulis dalam konstitusi, tidak terlepas dari perwujudannya di dalam negeri sendiri.

Pendidikan perdamaian merupakan suatu proses di mana individu dapat mengubah sikap dan perilaku mereka tentang konflik kekerasan, memperoleh nilai-nilai, pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan dan perilaku hidup rukun dengan orang lain. Yang ditekankan pada terwujudnya sebuah perdamaian adalah kondisi optimal dari keadaan damai yang dinamis dan memiliki adaptasi yang memadai terhadap perubahan lingkungan. Kondisi ini terjadi pada individu, sehingga menumbuhkan ketenangan pikiran, sosial, dan kehidupan bangsa dan negara (Kartadinata et al., 2015).

Menurut Woehrle, pendidikan perdamaian dalam konteks modern lebih menekankan pada pemahaman akan kehadiran konflik sebagai upaya membangun perdamaian yang sesungguhnya (Woehrle, 2017). Atau yang dikenal sebagai damai positif. Sementara itu, pemahaman akan suatu konflik muncul karena beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan bahwa konflik menghasilkan nilai-nilai positif;
- 2) Konflik dibangun oleh masyarakat secara sosial;
- 3) Hakikat dan kondisi manusia yang heterogen;
- 4) Konflik harus dilihat pada konteks sosialnya sendiri;
- 5) Konflik juga dapat terjadi secara alami dan bersifat dinamis;
- 6) Melihat konflik sebagai keuntungan bagi pihak-pihak yang berkonflik.

Pemahaman yang salah tentang konflik dapat berdampak pada perkembangan budaya damai yang berorientasi pada pendidikan

perdamaian. Dalam rangka mendidik masyarakat pada suatu pemahaman konflik secara kontekstual dan komperhensif, pendidikan perdamaian dapat dilakukan dengan di ranah-
ranah strategis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa pendidikan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) ranah, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

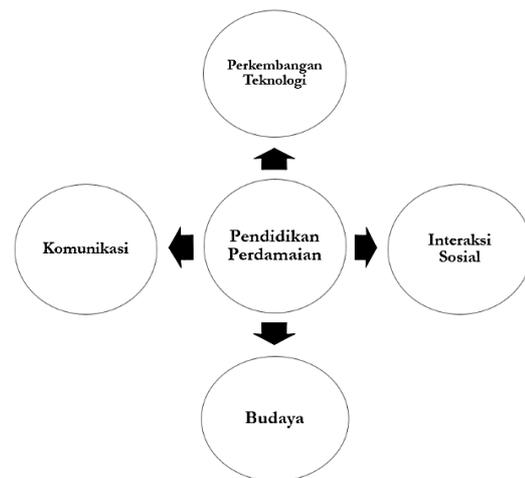
Pertama, ranah pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan anak usia dini (TK/RA) pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi atau tingkat perguruan tinggi. *Kedua*, ranah pendidikan nonformal (PNF) yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja/kursus, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan informal, yaitu semua pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial kemasyarakatan (Laelasari & Rahmawati, 2017).

Dengan adanya berbagai ranah atau jalur pendidikan yang dapat diikuti masyarakat, pendidikan perdamaian dapat dilaksanakan secara lebih fokus. Tentunya urgensi dalam mengoptimalkan pendidikan perdamaian harus memenuhi syarat-syarat kebutuhan masyarakat Indonesia dan melibatkan berbagai komponen atau *stakeholder*. Dengan memahami kondisi masyarakat yang beragam pendidikan perdamaian dapat mengadopsi beberapa konsep pendidikan multikulturalisme.

Secara konseptual, jika dihadapkan pada ranah pendidikan, kajian pendidikan multikultural dimaknai sebagai pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan yang berguna dalam membentuk sikap menghargai berbagai keragaman budaya yang hidup di dalam masyarakat. Pendidikan multikultural biasanya juga dapat dipahami sebagai pendidikan keragaman budaya yang ada dalam masyarakat, dimana berusaha menawarkan berbagai model keragaman budaya dalam masyarakat (Lue & Riyanto, 2020). Dari sinilah konsep awal yang menjadi substansi dalam mentransformasikan pendidikan perdamaian. Bahwa keragaman budaya masyarakat tidak hanya berada dalam kondisi yang tenang, namun keragaman budaya sangat rentan dalam memicu timbulnya konflik.

Dalam kurikulum pendidikan, sebetulnya pendidikan perdamaian telah diwadhahi dan diintegrasikan dalam mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. Materi-materi keberagaman dan toleransi seharusnya sudah menjadi dasar awal pemahaman peserta didik. Akan tetapi, hal itu dirasa tidak cukup dalam memberikan dan melatih peserta didik secara cakap dalam rangka mersepon adanya isu-isu kontemporer yang berkembang, ataupun ketika terjadi ketegangan dan konflik sosial.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan formal haruslah disokong oleh adanya pendidikan nonformal dan informal. Penyelenggaraan pendidikan ini lebih ditekankan pada aspek keterampilan dalam hidup bermasyarakat di tengah berbagai perubahan dan tantangan yang ada. Adapun menurut Lue & Riyanto (2020) pola pendidikan perdamaian dalam konteks multikultur sangat terkait dan berhubungan, serta dipengaruhi faktor-faktor interaksi sosial, budaya, komunikasi, dan juga perkembangan teknologi. Seperti pada gambar berikut;



Gambar 3. Pendidikan Perdamaian dalam Lingkup Multikultural
Sumber: Lue & Riyanto (2020)

Faktor-faktor seperti pada gambar di atas akan berpengaruh kepada pelaksanaan pendidikan perdamaian bagi masyarakat, yang dapat dilakukan di 3 ranah pendidikan. Selain budaya, tiga faktor lain yaitu, komunikasi, interaksi sosial, dan perkembangan teknologi juga beririsan dengan paradigma pendidikan abad-21 ini. Kemampuan komunikasi, dapat dikaitkan dengan bagaimana individu maupun masyarakat menyampaikan pesan yang dapat diterima dengan baik, sesuai dengan tujuannya. Dengan adanya kemampuan dan

keterampilan komunikasi, akan mendorong adanya interaksi sosial yang efektif, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dan konflik akibat tidak tersampainya informasi secara benar. Ditambah tuntutan dalam masyarakat multikultur adalah memahami bentuk komunikasi dari budaya-budaya yang berbeda.

Kemudian, terkait perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi di tengah kelimpahan informasi (*information overload*) yang beredar. Berbagai konflik sosial banyak disebabkan oleh berita palsu (*hoax*) yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Masyarakat yang tidak tercerdaskan dan tidak memperoleh pemahaman bagaimana meresponnya, cenderung mengedepankan emosi daripada menyikapinya secara bijak. Dengan berbagai fenomena dan permasalahan yang ada tentunya penguatan pendidikan perdamaian harus dipandang sebagai sebuah upaya berkelanjutan, yang ditujukan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang mencintai perdamaian, sehingga damai dapat menjadi bagian budaya yang harus dijaga.

Meskipun demikian, dalam penerapannya pendidikan perdamaian memiliki tantangan dan kendala. Terutama pada wilayah bekas konflik dan wilayah yang memiliki potensi konflik yang tinggi. Menurut Mardhiah (2016) yang melakukan penelitian di Aceh, dalam salah satu wawancaranya mengungkapkan tantangan pendidikan damai di Aceh, yaitu (1) kurangnya sumberdaya manusia, (2) fasilitas yang kurang memadai, (3) masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan, (4) iklim akademis kurang kondusif, (5) kurangnya partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak, (6) kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan anak, dan (7) kurikulum yang berubah-ubah (Mardhiah, 2016).

Selain itu, jika pendidikan perdamaian tidak dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dan kontekstual, misalnya dalam pembelajaran formal di sekolah, peserta didik akan merasa bosan dan tidak tertarik, sehingga nilai-nilai damai yang seharusnya tertanam dengan baik mudah saja terlupakan. Ditambah, pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan pendidikan perdamaian belum sepenuhnya ada pada para orang tua dan para pendidik dan guru. Oleh karena itu, dibutuhkan juga berbagai pelatihan atau kursus untuk para pendidik dan guru tentang pendidikan perdamaian.

Simpulan

Dinamika konflik sosial yang terjadi di Indonesia berkaitan erat dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Eskalasi konflik dengan korban jiwa dan kerugian materi yang besar terjadi pada periode transisi pasca Orde Baru, yaitu antara tahun 1997-2003. Kekerasan dan konflik sosial cenderung mengalami penurunan pada periode 2004 hingga saat ini. Akan tetapi, konflik sosial telah menemui fase baru pasca 2014, dimana sebagian besar isu mengarah kepada etno-religius. Isu ini kian memanas karena bertepatan dengan tahun-tahun politik, terutama pada 2016-2019. Isu etnis maupun agama pada periode ini telah dimanfaatkan dan memiliki posisi sentral dalam menciptakan polarisasi, ketegangan, dan konflik sosial di masyarakat. Perbedaan pandangan, tidak lagi dimaknai sebagai sebuah hal yang dapat dikompromikan dan ditoleransi.

Pendidikan perdamaian menjadi salah satu alternatif yang berperan penting dalam mencegah dan meredam terjadinya konflik sosial berdimensi SARA. Perwujudan perdamaian positif didasarkan dan diselenggarakan pada tiga ranah pendidikan, yaitu pertama, formal melalui pendidikan tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang diintegrasikan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama. *Kedua*, nonformal melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan. *Ketiga*, informal yang dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Pendidikan perdamaian merupakan upaya jangka panjang dan berkelanjutan.

Referensi

- Barron, P., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2016). When Large Conflicts Subside: The Ebbs and Flows of Violence in Post-Suharto Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 16(2), 191–217. <https://doi.org/http://doi:10.1017/jea.2016.6>
- Burhani, H., Awaludin, A., Haryadi, D., & Sila, M. A. (2020). *Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan dan Solusi*.
- Effendi, M. R., & Syafrudin, I. (2020). Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 12–27. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14528>

- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (Vol. 14). Sage.
- Hogg, M. A. (2016). Social Identity Theory. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), *Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory: Contemporary Global Perspectives* (pp. 3–17). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6_1
- Kartadinata, S., Affandi, I., Wahyudin, D., & Ruyadi, Y. (2015). *Pendidikan Kedamaian*. Rosda.
- Laelasari, E., & Rahmawati, A. (2017). *Pengenalan Pendidikan Formal dan Informal*.
- Lue, M. M., & Riyanto, K. B. (2020). Multicultural Social Peaceful Education through Social Guidance and Counseling Services in Development of Industrial Revolution 4.0. *2nd International Seminar on Guidance and Counseling 2019 (ISGC 2019)*, 241–245.
- Mardhiah, A. (2016). *Implementasi Pendidikan Damai di Madrasah Aliyah Negeri Rukoh*. Cinta Buku Media.
- Muliono, M. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan*, 1(2), 115–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/a1-adyan.v1i2.1949>
- Noorfitriyani, L., Gunawan, D., & Kertawidana, I. D. K. (2018). Pencegahan Perilaku Agresif: Pengaruh Pendidikan Perdamaian dan Literasi Media Terhadap Pemahaman Siswa Tentang Agresivitas. *Damai Dan Resolusi Konflik*, 4(1), 1–20.
- Nurcholish, A. (2021, May 21). *Urgensi Pendidikan Perdamaian dalam Konteks Keindonesiaan*. Kabardamai.Id. <https://kabardamai.id/urgensi-pendidikan-perdamaian-dalam-konteks-keindonesiaan-2/>
- Rahayu, R. T., Jayusman, J., & Sodiq, I. (2016). Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995. *Journal of Indonesian History*, 5(1).
- Rosana, E. (2015). Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>
- Rosyid, M. (2020). Solusi Penuntasan Akar Konflik Sara: Belajar dari Kasus Konflik Muslim-Buddhis di Tanjungbalai Medan Tahun 2016. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 9(2), 233–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.5308>
- Scheepers, D., & Ellemers, N. (2019). Social Identity Theory. In K. Sassenberg & M. L. W. Vliek (Eds.), *Social Psychology in Action: Evidence-Based Interventions from Theory to Practice* (pp. 129–143). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13788-5_9
- Siregar, L. P. (2017, December 27). *Politik SARA “lebih buruk” dari politik uang karena berdampak perpecahan*. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006>
- Soekanto, S. (1983). *Pribadi dan Masyarakat: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Alumni.
- Sukendar, S. (2011). Pendidikan damai (peace education) bagi anak-anak korban konflik. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 271–286.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun.
- Wibowo, D. (2021, July 26). *Anak Indonesia dan Urgensi Pendidikan Perdamaian*. MediaIndonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/opini/420924/anak-indonesia-dan-urgensi-pendidikan-perdamaian>
- Woehrle, L. M. (2017). Realizing peace: a constructive conflict approach.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>